

Menuju Pembangunan Global Yang Demokratis: Kritik Wangari Maathai Terhadap Wacana Pembangunan Global

Alanuari Haryu Kharisma

Program Studi Hubungan Internasional, FISIP,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: alanuari.haryu.2014@fisipol.umy.ac.id

Abstrak

Agenda pembangunan global yang telah disusun selama ini faktanya belum dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan belum terdistribusi secara merata. Untuk itu pembangunan diwajibkan memiliki kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dengan menggunakan prespektif seorang Wangari Maathai, artikel ini berusaha mengevaluasi, sekaligus memberikan pandangan baru terhadap agenda pembangunan global yang lebih demokratis. Melalui konsep *counter discourse*, artikel ini melihat kegagalan pembangunan terjadi karena sering kali dimensi lingkungan yang menjadi kunci pembangunan yang berkelanjutan menjadi anak tiri dalam agenda pembangunan global. Hal ini menjadikan pentingnya kehadiran sebuah sudut pandang baru dalam menyusun agenda pembangunan global seperti *Three Legged Stool* yang menekankan adanya ruang demokrasi, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, budaya damai dalam mengatasi kemiskinan, dan memberikan kesejahteraan secara merata dan berkelanjutan. Gagasan tersebut menjadi penting karena lebih menekankan kestabilan dan integrasi antara dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan, yang harus ada dalam sebuah agenda pembangunan yang berkelanjutan secara holistik.

Kata Kunci: *Three Legged Stool, Wangari Maathai, Pembangunan, Counter Discourse*

Abstract

Global development agenda that has been arranged today, in fact, it has not reached its purpose. The decrease of poverty and the increase of prosperity has not delivered equally. So, it is important to develop a holistic and sustainable tool for global development agenda. Using Wangari Maathai's perspective, this article tries to evaluate and give a new perspective of more democratically global development agenda. Through the concept of counter discourse, this article found that the failed development happened because the environmental dimension of development has been ignored. So, it's important to welcome a new perspective in developing a development's formula like the idea of Three Legged Stool that emphasis on existing the pillar of peace, the pillar of the environment, and the pillar of democratic space, are extremely important for any state that intends to be stable on their development. That idea is important for development that emphasized on the balance and the integration among dimension of economic, social and environment in a sustainable development that must be conceived and implemented holistically.

Keywords: *Three Legged Stool, Wangari Maathai, Development, Counter Discourse*

Pendahuluan

Permasalahan pembangunan telah terjadi diseluruh penjuru dunia. Tidak sedikit negara yang telah mengalami kegagalan dalam menjalankan pembangunan, baik yang disebabkan dari aspek internal (*indogeneous aspects*) maupun aspek eksternal (*exogenous aspects*) (Budiman, 2000). Melihat hal itu, para pemimpin negara berkomitmen dan bekerjasama dalam menyusun beragam agenda pembangunan baik ditingkat nasional maupun global. Berbagai kebijakan yang berisi beragam solusipun dirancang untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Penelitian ini akan lebih menekankan pada prespektif Wangari Maathai¹ sebagai perwakilan dari negara dunia ketiga dalam merespon agenda pembangunan global yang telah disusun selama ini. Dengan melihat perkembangan agenda pembangunan global, gagasan *Three Legged Stool* digunakan Maathai untuk memberikan tanggapan dan tawaran pembangunan sebagai langkah alternatif dunia untuk menciptakan agenda pembangunan yang lebih demokratis.

Perkembangan Agenda Pembangunan Global

Pembangunan mulai dikenal secara luas ketika negara-negara dunia ketiga memperoleh kemerdekaannya sekitar tahun 1950-1970. Ketika itu, kemiskinan dan kesenjangan menjadi tantangan baru yang krusial dan harus segera ditangani. Istilah “pembangunan” selanjutnya muncul sebagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan pembangunan, negara-negara yang baru merdeka diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dan kesenjangan serta mengejar ketertinggalan mereka dengan negara yang sudah maju terlebih dahulu.

Setelah Perang Dunia ke-II berakhir, di dunia internasional telah terjadi pergeseran dominasi isu, dari isu *high politic* menjadi isu *low politic*. Hal ini menjadikan pandangan terhadap keamanan pun ikut berubah. Munculnya berbagai aktor baru dalam dunia internasional merubah paradigma isu keamanan yang bersifat tradisional menjadi non-tradisional.

Keamanan tidak hanya menitikberatkan pada negara sebagai aktor dominan, namun diperluas hingga ke tingkat individu (*human security*). Keamanan pun kini melingkupi keamanan pangan, keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, keamanan kesehatan, dan lain-

lingkungan dari Kenya.

¹ Wangari Maathai adalah tokoh politik dan

lain (Winarno, 2014: 8-9). Dengan demikian, ancaman dari keamanan pun meluas hingga mencakup ancaman yang bersifat nonmiliter, seperti kelaparan, kemiskinan, kesenjangan, wabah penyakit dan lain-lain.

Dalam hal ini, sebuah negara yang stabil akan lebih menghargai dan memenuhi hak masyarakatnya. Pemerintah di negara tersebut lebih memilih untuk berinvestasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, bukan untuk meningkatkan kekuatan militernya. Seperti dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, memberikan pelatihan, pengadaan teknologi untuk pengembangan masyarakat, dan meningkatkan fasilitas kesehatan, daripada menambah jumlah senjata. Tindakan tersebut akan membuat masyarakat merasa lebih aman dan tidak tertekan (Maathai, 2005).

Menilik pada perkembangan agenda pembangunan global, pada awalnya, pembangunan sering dikaitkan dengan istilah modernisasi dan industrialisasi. Tujuan dalam pembangunan ketika itu adalah meningkatkan perekonomian dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Pembangunan hanya melihat pertumbuhan ekonomi sebagai alat untuk mengukur kesuksesan pembangunan. Sebuah negara akan dinilai berhasil melaksanakan pembangunan apabila

pertumbuhan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Jika dikaitkan dengan hal itu, pembangunan dapat dihitung sebagai jumlah kekayaan keseluruhan sebuah bangsa atau Negara (Budiman, 2000). Sehingga, model pembangunan ini sangat membutuhkan kebijakan pembangunan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti Konsensus Washington.

Dalam Konsensus Washington terdapat kebijakan ekonomi sebagai standar reformasi bagi negara berkembang untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang memicu terjadinya krisis global. Dipicu dari kegagalan pemerintah dalam mengelola kegiatan ekonomi, konsensus ini berupaya melakukan stabilisasi melalui kebijakan dalam penyesuaian struktural yang direkomendasikan oleh organisasi Bretton Woods dan Badan Ekonomi Amerika Serikat. Secara retorik, konsensus ini melibatkan keterikatan ideologi neoliberal universalis yang mendukung pasar bebas dan mencurigai negara sebagai sumber masalah dalam pembangunan, seperti korupsi dan kebijakan yang tidak efisien. Konsensus ini lebih menekankan pada kebijakan yang terkait ekonomi makro, nilai tukar mata uang yang lebih kompetitif, privatisasi, liberalisasi keuangan dan perdagangan serta deregulasi (Yustika, 2004). Dalam

Konsensus Washington, pembangunan merupakan hasil dari seperangkat insentif dan kebijakan ekonomi neoklasik, termasuk pengekangan fiskal, privatisasi, penghapusan intervensi pemerintah dalam harga, adanya fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan liberalisasi pada perdagangan, keuangan, dan modal (Saad-Filho, 2010).

Setiap kebijakan yang terdapat pada konsensus tersebut merupakan solusi yang baik untuk mendorong pembangunan yang memiliki fokus pada kebutuhan dalam menciptakan kebijakan fiskal, khususnya ekonomi makro. Williamson, selaku pencetus konsensus ini, menekankan bahwa konsensus yang terdiri dari sepuluh kebijakan ini merupakan daftar kebijakan yang diperlukan negara-negara yang sedang mengalami krisis moneter seperti negara-negara di Amerika Latin (Williamson, 2004).

Selanjutnya, model pembangunan yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi mulai tidak diterima oleh beberapa negara. Para pemimpin negara menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu dijadikan sebagai alat ukur kesuksesan sebuah pembangunan. Tolak ukur tersebut dianggap belum mampu menciptakan kesejahteraan bagi negara yang menjalankannya dan hanya menimbulkan berbagai permasalahan pembangunan,

seperti krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pangan yang semakin parah dan kerusakan lingkungan yang terjadi dimana-mana.

Seperti yang diungkapkan oleh Mahbub Ul Haq bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting, khususnya untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Namun, kehidupan manusia tidak sepenuhnya akan bergantung pada ekonomi saja. Oleh karena itu, pembangunan harus lebih dari sekadar perluasan pendapatan dan kekayaan semata. Kesejahteraan dapat dicapai ketika negara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga menyediakan kebutuhan sosial secara merata, seperti penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat. Dengan demikian, para pengambil kebijakan perlu memperhatikan pentingnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Kebijakan yang diambil akan lebih fokus memberikan kontribusi pada pengembangan manusia dan pengurangan kemiskinan. Sehingga pembangunan mampu menyediakan lingkungan bagi masyarakat untuk menikmati hidup yang panjang umur, sehat dan kreatif (Baru, 1998).

Di tahun 2000, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) berkomitmen untuk menjawab tantangan tersebut. Partisipasi yang efektif dari semua negara dalam merancang dan melaksanakan sebuah agenda pembangunan global merupakan suatu hal yang penting. Oleh karena itu, mereka berkumpul di markas PBB di New York untuk menyusun dan menyepakati sebuah piagam, yaitu Deklarasi Milenium yang merupakan pondasi untuk menciptakan sebuah dunia yang lebih sejahtera, damai, dan adil. Selain itu, dalam piagam tersebut dijelaskan pula mengenai nilai-nilai esensial dalam hubungan internasional di abad ke-21. Nilai-nilai tersebut seperti kebebasan, kesetaraan, solidaritas, toleransi, menghormati alam, dan tanggung jawab bersama. Dalam agenda ini pula, 189 negara telah berkomitmen penuh untuk mengurangi kemiskinan disegala aspek kehidupan pada tahun 2015, dengan menjalankan pembangunan nasional mengacu pada Agenda Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/ MDGs*) yang diyakini mampu mengatasi tantangan di era globalisasi ini, seperti kemiskinan dan kesenjangan.

Setelah 15 tahun berselang, PBB menegaskan bahwa MDGs merupakan sebuah gerakan anti kemiskinan paling sukses sepanjang sejarah (World Vision International, "*Were the Millennium Development Goals a success? Yes! Sort of*", 03 Juli 2015). Hampir seluruh target-

target dalam setiap tujuan MDGs dapat dicapai dengan baik, terutama pada pengurangan angka kemiskinan global yang menjadi fokus utama dalam agenda tersebut. Angka kemiskinan global telah berkurang dari 1.9 miliar di tahun 1990 menjadi 836 juta di tahun 2015 (The Guardian, "*What Have the Millennium Development Goals Achieved?*", 06 Juli 2015). Namun sayangnya, agenda pembangunan tersebut belum mampu mendapat predikat sebagai agenda pembangunan yang memiliki unsur keberkelanjutan.

Berbagai pertemuan dan laporan penting mengenai pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mencari titik temu antara pembangunan dan pelestarian lingkungan dari waktu ke waktu semakin giat dilaksanakan. Pada tahun 2012, PBB mengadakan sebuah konferensi yang menggemakan kembali konsep pembangunan berkelanjutan yang pertama dicetuskan dalam laporan *Brundtland* tahun 1987. KTT RIO 2012 atau Rio +20 menjadi konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk dari tindak lanjut atas KTT Bumi tahun 1992. Konferensi ini diadakan di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 20- 22 Juni 2012 (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, "*Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20): Masa Depan yang Kita*

Inginkan”, 06 Juli 2012).

Dalam rangka menindaklanjuti komitmen KTT Rio+20, ditahun 2015 negara-negara anggota PBB telah menyepakati agenda pembangunan global yang baru. Agenda itu ialah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) yang disusun untuk menyelesaikan tujuan-tujuan MDGs yang belum tercapai, sekaligus menjadi arah pembangunan global baru bagi negara-negara anggota PBB dalam melaksanakan pembangunan nasional (United Nations, “*Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*”, 21 Oktober 2015). Salah satu hal yang membedakan dengan agenda pembangunan sebelumnya adalah tujuan SDGs yang bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, namun sekaligus untuk melindungi planet dari kerusakan lingkungan.

SDGs lebih menekankan penyelarasan tiga elemen inti dari pembangunan berkelanjutan yaitu: pertumbuhan ekonomi, tatanan sosial yang inklusif dan perlindungan terhadap lingkungan. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan sangat penting bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Jika sebelumnya MDGs cenderung hanya melingkupi pemenuhan hak dasar warga negara, dalam SDGs lebih memperluas

dimensi lingkungan agar tercipta pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Pendekatan baru ini ditujukan agar dapat mencapai 17 tujuan SDGs yang diperinci dalam 169 target yang akan dicapai di tahun 2030.

Kritik terhadap Pembangunan

Dunia terus mengembangkan agenda pembangunan yang diharapkan mampu mengatasi tantangan global yang semakin kompleks. Perluasan dari aspek-aspek dalam pembangunan senantiasa selalu dilakukan agar menciptakan kesejahteraan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar kualitas kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu dapat mengalami peningkatan. Namun sayangnya, berbagai kegagalan pembangunan pun telah terjadi. Manfaat dari pembangunan yang telah dilaksanakan tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Sebagian besar kegagalan itu terjadi di negara-negara di Benua Afrika, seperti di Kenya.

Munculnya tantangan dari Panitia Nobel Perdamaian yang menghubungkan arti perdamaian dengan pembangunan serta lingkungan, menjadikan sebuah kritik untuk agenda pembangunan yang hanya mementingkan kepentingan ekonomi tanpa melihat kepentingan lingkungan. Mereka berpendapat bahwa

tidak akan ada perdamaian tanpa pembangunan yang adil dan tidak akan ada perdamaian tanpa pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dalam ruang lingkup demokrasi (Maathai, 2012: 134). Menurut Maathai, hubungan antara perdamaian, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan *good governance*–demokrasi–yang dibuat oleh Panitia Nobel Norwegia ini, mengharuskan umat manusia perlu memikirkan kembali arti perdamaian dan keamanan untuk mencapai budaya damai. Dengan kata lain, perdamaian dan keamanan akan dicapai ketika pembangunan dilaksanakan secara demokratis; menghormati peraturan hukum dan hak asasi manusia; mendorong keadilan dan kesetaraan secara nyata dan sadar; dan mengelola sumber daya yang lebih bertanggung jawab dan dapat dipercaya tidak hanya untuk generasi sekarang, namun juga untuk generasi mendatang (Maathai, 2008: 294).

MDGs memang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara global, namun perlu disadari bahwa kesuksesan dalam MDGs belum dapat dirasakan secara merata diseluruh wilayah di dunia. Masih banyak wilayah-wilayah di dunia yang belum merasakan keuntungan dari MDGs. Kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan masih banyak terjadi. Khususnya di negara-

negara yang belum memiliki sektor ekonomi yang kuat seperti negara-negara di Benua Afrika. Di Asia Tenggara berhasil melampaui tujuan pengurangan kemiskinan sebesar 16%, Asia Selatan dapat melampaui target hingga 12,5%, Afrika Utara hanya berkurang sekitar 1,2%, dan Sub-Sahara Afrika merupakan yang paling jauh tertinggal (The Borgen Project, “MDG Failures”, 19 November 2015). Kegagalan tersebut terjadi karena dalam pelaksanaannya, pembangunan hanya melihat pada aspek ekonomi saja. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti yang dilakukan dalam MDGs dan Konsensus Washington yang sangat jelas mengarah hanya pada aspek ekonomi.

Seperti yang dilihat Wangari Maathai, agenda pembangunan global yang telah dijalankan selama ini masih mementingkan kepentingan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan yang harus dicapai agar terbebas dari kemiskinan dan kesenjangan. Sebenarnya Maathai tidak sepenuhnya ketat terhadap aspek ini. Semua sistem politik, lembaga-lembaga negara dan nilai-nilai kebudayaan serta arah dan indikator menuju pertumbuhan ekonomi dapat dibenarkan sejauh hal tersebut mendorong kebebasan dasar (*basic freedom*), termasuk hak asasi manusia, dan kesejahteraan baik individu maupun

kolektif (Maathai, 2010: 56). Namun, ketika hanya aspek ekonomi yang dijalankan maka pembangunan tidak akan seimbang, tidak holistik dan tidak berkelanjutan. Pembanguann selanjutnya akan menimbulkan permasalahan baru, seperti masalah dalam aspek lingkungan.

Sebenarnya yang perlu mendapat perhatian utama dalam agenda pembangunan global menurut Wangari Maathai adalah ketidakseimbangannya dimensi-dimensi dalam pembangunan—ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun dalam pembangunan telah memasukkan tiga dimensi tersebut, namun pembangunan selama ini hanya memperhatikan beberapa aspek saja, terutama dimensi ekonomi. Maathai melihat agenda pembangunan global seperti MDGs, sebagai agenda pembangunan global yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Wangari Maathai, dalam bukunya *The Challenge For Afrika (2010)*, melihat kesehatan ekologi merupakan hal yang sangat penting dalam meraih setiap tujuan dalam MDGs. *“Achieving each of the eight MDGs depends heavily on healty ecosystem; but this fact is often overlooked, and the seventh MDGs has not received as much attention as the others. In my view, however, it is the most important, and all*

of the other goals should be organized around it. What happens to ecosystem affect everything else...” (Maathai, 2010: 240).

Segala pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan aspek lingkungan. Kesehatan ekosistem merupakan hal yang sangat menentukan setiap usaha yang dilakukan guna mencapai tujuan MDGs, namun faktanya, hal tersebut sering dihiraukan. Negara-negara masih memilih untuk mencapai tujuan yang lain, khususnya ekonomi daripada memperhatikan kelestarian lingkungan (Maathai, 2010).

Telah terjadi berbagai permasalahan lingkungan di beberapa belahan dunia akibat pembangunan. Hampir 5.2 juta hektar hutan hilang di tahun 2010. Pembangunan yang dilakukan banyak mengorbankan hutan yang merupakan sumber oksigen dunia. Deforestasi terjadi secara brutal demi memenuhi kebutuhan pembangunan. Pada tahun 1990, luas hutan di dunia mencapai 41.282.695 km² dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2012 yang mencapai 40.024.415 km² (The World Bank, *“Forest Area (sq.km)”*, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa deforestasi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Deforestasi terjadi karena hutan dikonversi menjadi lahan pertanian,

perkebunan, pemukiman penduduk dan kawasan komersil.

Hal itu semakin mendorong peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂) dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah emisi CO₂ terjadi dari tahun 1990 dengan jumlah total 38.232.170 kt hingga di tahun 2012 berjumlah 53.526.303 kt (The World Bank, *“Total Greenhouse Gas Emissions (kt of CO₂ Equivalent)”*, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa produksi akan gas rumah kaca semakin tinggi. Terlebih lagi, hal ini semakin diperparah dengan berkurangnya luas hutan dari tahun ke tahun yang seharusnya dapat mengurangi emisi yang diproduksi. MDGs telah mengakibatkan jumlah emisi CO₂ secara global dapat dikatakan diluar harapan dunia. Terdapat peningkatan 50% emisi CO₂ dan lebih dari 40% wilayah di bumi mengalami kelangkaan air jika dibandingkan pada tahun 1990 (The Borgen Project, *“MDG Failures”*, 19 November 2015).

Kenaikan emisi CO₂ memiliki dampak yang mengglobal, seperti terjadinya perubahan iklim dengan cuaca-cuaca yang ekstrim, suhu bumi yang meningkat, es di Kutub Utara dan Selatan mencair, meningkatnya volume air laut, semakin menipisnya lapisan O₃ (ozone) dan lain sebagainya. Sepanjang dari awal abad 21, benua Eropa menerima dampak

perubahan iklim yang sangat signifikan. Tahun 2007, Inggris mengalami musim hujan paling basah dibulan Mei, Juni dan Juli semenjak 240 tahun yang lalu. Sedangkan Yunani, mengalami musim panas paling panas dalam satu abad ini (Fischer & Sykes, 2009). Pada tahun 2009, konsentrasi O₃ di Eropa diperkirakan menjadi dua kali lipat daripada ketika awal industrialisasi.

Konsentrasi O₃ yang tidak stabil akan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi manusia seperti gangguan pernafasan dan iritasi mata. Suhu yang tinggi, radiasi matahari yang kuat dan kecepatan angin yang rendah terjadi di Eropa bagian Selatan selama musim panas dan tidak hanya itu, di bagian Utara Eropa konsentrasi O₃ lebih rendah di bagian Selatan (Engardt, 2009). Di India, kerusakan lingkungan terjadi sangat ekstrim. Banyak kepulan asap industri telah merusak atmosfer India. Hal ini menjadikan di India mengalami perubahan iklim yang ekstrim setiap tahun, dan hampir setiap tahun negara ini mengalami kabut asap dan gelombang panas yang terus meningkat.

Didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi, industri dan pertambangan, menjadikan pembangunan hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat kesehatan

ekosistem. Alhasil, ekspansi pembangunan semakin meluas dan menjadikan konsumsi akan sumber daya alam semakin banyak. Hal ini mengakibatkan jumlah emisi karbon yang semakin bertambah dan semakin mengancam Bumi. Meskipun berbagai konferensi lingkungan tingkat dunia terus dilakukan, namun belum secara signifikan merubah pola pembangunan menjadi pembangunan yang ramah lingkungan. Deforestasi terjadi dimana-mana demi memenuhi kebutuhan pembangunan. Ditambah lagi dengan semakin berkembang pesatnya teknologi, industri dan pertambangan, menjadikan pembangunan hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun demikian, menurut Wangari Maathai, agenda pembangunan global seperti MDGs merupakan alat yang berguna, tidak hanya untuk menganalisa atau mengukur pembangunan secara umum. Namun juga sebagai alat untuk mengukur komitmen para pemimpin negara-negara industri maju dan negara berkembang dalam mengembangkan dunia yang sejahtera dan dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan (Maathai, 2010: 239).

Pembangunan yang Demokratis dan Berkelanjutan

Setiap pembangunan yang dilaksanakan haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah agenda pembangunan yang mampu mengakomodasi masalah yang menghalangi pencapaian kesejahteraan. Menurut Maathai, pembangunan bukan hanya sebatas mengenai pertumbuhan ekonomi, melainkan harus mencakup segala aspek kehidupan manusia. Pembangunan tidak hanya diartikan sebagai pengakuisisian sebuah materi, meskipun setiap orang harus hidup bermartabat dan tidak merasa takut akan kelaparan atau menjadi Tuna Wisma. Pembangunan merupakan sarana untuk mencapai kualitas hidup yang berkelanjutan dan memungkinkan untuk mengekspresikan kreativitas dan rasa kemanusiaan secara penuh (Maathai, 2010: 56). Menurut Maathai, memperluas kebebasan dan penghormatan hak yang nyata dan harus dirasakan oleh masyarakat secara luas menjadi hal yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal tersebut haruslah beriringan dengan adanya pengelolaan lingkungan dan penciptaan budaya damai demi mencapai kesejahteraan yang sebenarnya dalam sebuah pembangunan. Dengan demikian, atas hal-hal tersebut, pembangunan

membutuhkan formula-formula yang holistik dan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Maathai melihat bahwa pembangunan perlu memperhatikan hubungan antara perdamaian, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan *good governance*. Ketiga hal tersebut penting untuk diperhatikan agar pembangunan yang dilakukan mampu menciptakan kesejahteraan dan perdamaian. Untuk mencapai formula tersebut, menurut Maathai, pembangunan haruslah lebih menekankan pada kestabilan antara perdamaian, demokrasi dan pengelolaan lingkungan yang tersusun dalam prinsip *Three Legged Stool* (bangku berkaki tiga). Prinsip tersebut merupakan hal yang fundamental dalam melaksanakan pembangunan. Ketiga kaki pada bangku berkaki tiga merepresentasikan tiga pilar utama untuk menciptakan kondisi masyarakat yang stabil dan mendorong pembangunan yang sukses (Maathai, 2010: 56-57).

Pilar yang pertama dalam bangku tersebut adalah adanya ruang demokrasi di dalam negara ketika melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, demokrasi yang Maathai maksud lebih kepada penghormatan berbagai hak, baik itu hak asasi manusia, hak wanita, hak anak, hak lingkungan dan lain sebagainya yang dihormati dan dijunjung tinggi.

Demokrasi tidak hanya diartikan sebatas *voting* saja, namun diartikan meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dalam menyediakan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat, dan memberdayakan mereka menjadi *partner* yang aktif dalam pembangunan. Secara umum, demokrasi dapat berarti perlindungan terhadap hak-hak minoritas; parlemen yang efektif dan benar-benar sebagai perwakilan rakyat; peradilan yang *independent*; melibatkan masyarakat; kebebasan pers dan media massa; kebebasan berkumpul; kebebasan mempraktikkan agama; adanya advokasi hukum; aktifnya masyarakat sipil tanpa adanya intimidasi (Maathai, 2010: 56). Jika telah memiliki tata kelola yang demokratis, maka masyarakat dan pemerintah mampu mendorong terselenggaranya budaya damai, sehingga masyarakat dapat menemukan sebuah lingkungan yang damai untuk melaksanakan aktivitas mereka (Maathai, 2006). Dengan demikian negara yang demokratis merupakan negara yang mampu menjalankan pembangunan dengan baik.

Permasalahan yang dialami oleh negara biasanya terjadi karena negara tidak mampu memberikan dan menghormati hak-hak dasar masyarakat secara merata. Masyarakat merasa

terancam ketika hak-hak mereka tidak terpenuhi. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat dan mengakibatkan ketidakstabilan kondisi negara, seperti masalah kelaparan. Kelaparan biasanya bukan merupakan akibat langsung dari kekurangan pangan melainkan apa yang Amartya Sen sebut sebagai “kegagalan pemberian hak” (Hettne, 2001).

Pilar kedua dalam *Three Legged Stool* yaitu pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Maathai melihat antara pembangunan dan lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut haruslah seimbang jika ingin mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Seperti yang dikatakan Maathai, “*I often asked whether a trade-off is required between the environment and development. I always say no. We need and must have both; what is important is a good balance between the two*” (Maathai, 2010: 250). Dengan adanya keseimbangan tersebut, manfaat dari pembangunan dapat dirasakan baik untuk kehidupan sekarang maupun masa depan yang dilakukan secara adil dan pantas, termasuk untuk masyarakat terpinggir. Jika pembangunan yang dilakukan tidak disertai dengan adanya

perhatian terhadap lingkungan, maka akan menciptakan *maldevelopment* atau pembangunan yang salah seperti apa yang disampaikan oleh Vandana Shiva. Pembangunan tersebut hanyalah sebuah proses eksploitasi dan dominasi terhadap perempuan dan alam (Keraf, 2002).

Pilar ketiga adalah budaya damai (*culture of peace*), dimana hal ini terdiri dari adanya keadilan, penghormatan, perasaan keharuan, kemauan untuk memaafkan, balas budi dan keadilan. Budaya damai sangat dibutuhkan untuk menciptakan situasi aman dan stabil dalam negara. Ketika setiap masyarakat dan pemerintah dapat saling menghargai satu sama lain, maka akan tercipta perasaan aman dalam menjalankan aktivitas. Hal ini menjadikan masyarakat lebih kreatif dan produktif. Terlebih lagi dengan situasi tersebut, masyarakat akan mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, karena mereka merasa dihargai dan sadar jika pembangunan tersebut bermanfaat untuk mereka. Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik secara holistik dan berkelanjutan.

Maathai menekankan kembali bahwa ketiga aspek tersebut haruslah berjalan seimbang dan terintegrasi. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka kegagalan pembangunan akan terjadi dan

memperburuk kondisi negara, seperti menciptakan ketidakstabilan negara. Setiap pilar dibuat untuk saling menguatkan satu sama lain, sehingga setiap permasalahan harus diselesaikan secara bersama-sama dan simultan. Memiliki bangku yang stabil berarti menjamin sebuah pembangunan yang holistik; menempatkan sebuah prioritas pemerintah yang demokrasi dan menghormati hak asasi manusia atau hak yang lainnya; penggunaan semua sumber daya yang adil, bertanggung jawab dan berkelanjutan; dan mengelola urusan negara dengan cara yang bertanggung jawab. Ketika semua segi tersebut berada pada tempatnya, negara akan memiliki stabilitas, perdamaian, dan pembangunan (Hettne, 2001: 58). Di negara yang diktaktor atau yang menganut sistem partai tunggal, sumber daya tidak dapat dibagi secara sama dan berkelanjutan, karena pemimpin politik mereka cenderung untuk memenuhi porsi mereka sendiri, kroni-kroni dan pendukung mereka. Ketika ruang demokrasi telah dibentuk, maka budaya damai akan terbentuk dan berkembang. Ketika ketiga pilar tersebut ditekan atau tidak ada, maka perdamaian akan sukar didapat dan lebih banyak konflik yang akan terjadi (Keraf, 2002: 57).

Maathai menambahkan bahwa selain dari ketiga pilar pembangunan yang

harus dipenuhi, peran masyarakat menjadi sangat penting dalam mencapai kestabilan pilar tersebut. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dan peran masyarakat sipil yang aktif, pembangunan yang berkelanjutan dan merata akan menjadi suram. Pilar-pilar dari bangku tersebut tidak akan tersusun dan kuat tanpa rangkulan dari masyarakat. Pemerintah akan menjadi lebih terbuka transparan dan bertanggung jawab; promosi yang dilakukan secara adil dan merata; dan pencapaian perdamaian yang semakin terselenggara (Maathai, 2010: 58-62).

Pilar demokrasi, pilar lingkungan dan pilar perdamaian, sangat penting untuk dikelola secara seimbang. Jika melihat konflik yang terjadi selama ini, konflik tersebut lebih disebabkan karena ketiga pilar dalam *Three Legged Stool* tidak dikelola dengan baik dan seimbang baik terjadi di tatanan nasional, kawasan maupun global. Ketika sebuah negara bersandar terhadap tiga pilar tersebut, maka akan membuka kesempatan untuk melakukan pembangunan dan negara akan merasa terlindungi dan aman (Maathai, 2005).

Selain itu, sebuah bangku yang aman atau dalam hal ini sebuah negara yang stabil akan menarik hati berbagai pihak seperti negara-negara maju, lembaga pembangunan internasional—PBB, WTO dan Bank

Dunia-, MNC, dan NGO untuk bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan di negara tersebut. Seperti bangku yang stabil akan menyediakan lingkungan dimana pemerintah dapat menerima dana bantuan dari berbagai pihak, seperti lembaga peminjam, atau sumbangan swasta, dan menggunakan dana tersebut secara bertanggung jawab—bebas korupsi—untuk keuntungan masyarakat banyak. Namun, jika kondisi bangku tersebut tidak stabil, maka bantuan pembangunan akan sukar didapatkan. Bahkan jika bantuan tersebut tetap diberikan dengan kondisi negara yang tidak stabil, maka bantuan tersebut hanya akan memperburuk pembangunan. Menurut Maathai, ketika ketiga pilar itu tidak stabil, tidak bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut dan tidak peduli seberapa banyak bantuan yang mereka berikan, maka bantuan tersebut hanya akan berdampak sementara, menjadi sia-sia, atau malah menambah ketidakstabilan dalam masyarakat (Maathai, 2005).

Kesimpulan

Pembangunan merupakan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian dunia. Berbagai tantangan pembangunan muncul menantang para pemimpin negara dan ilmuwan untuk

merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat. Melalui prespektif Wangari Maathai, agenda pembangunan yang selama ini disusun belum dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata, khususnya dalam mengurangi persentasi angka kemiskinan global. Hal ini terjadi karena masih adanya praktik neoliberal dibalik kerjasama pembangunan yang dilakukan antar negara dan kurangnya integrasi serta keseimbangan diantara dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjadi aspek fundamental dalam sebuah agenda pembangunan berkelanjutan. Maathai melihat, disamping hak-hak masyarakat yang harus dihormati oleh negara, perlu didampingi dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab yang akan lebih mendorong terciptanya pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam *Three Legged Stool*, yang mengintegrasikan secara seimbang tiga pilar fundamental dalam pembangunan berkelanjutan dan sekaligus sebagai *counter discourse* agenda pembangunan yang telah disusun selama ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burchill, S., & Linklater, A. (1996). *Theories of International Relations*. New York: ST. Martin's Press, INC.
- Hettne, B. (2001). *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Keraf, A. S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Maathai, W. (2008). *Unbowed*. London: Anchor Book.
- Maathai, W. (2010). *Replenishing The Earth: Spiritual Values for Healing Ourselves and the World*. New York: Doubleday Religion.
- Maathai, W. (2010). *The Challenge for Africa*. New York: Anchor Book.
- Maathai, W. (2012). *Gerakan Sabuk Hijau*. Jakarta Pusat: Marjin Kiri.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Economic development* (12th ed.). New Jersey: Pearson.
- Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu- Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Jurnal**
- Apriwan. (2011). Millenium Development Goals : Sebuah Analisa Etis dalam Perspektif dan Praksis. *Jurnal Studi Hubungan Internasional*, 1, 106–114.
- Baru, S. (1998). Mahbub ul Haq and Human Development: A Tribute. *Economic and Political Weekly*, 33(35), 2275–2279.
- Byfield, J. (2012). Gender, Justice, and the Environment: Connecting the Dots. *African Studies Review*, 55(1), 1–12.
- Carroll, T. (2012). Pendahuluan: Kebijakan Pembangunan Neo-liberal di Asia Pasca-Konsensus Washington. *Journal of Contemporary Asia*, 42(3), 7–18.
- Change, E., & Program, S. (2009). The Challenge for Africa : A Conversation With Wangari Maathai.
- Devita, D. E., & Waluyo, T. J. (2014). Pengaruh Gerakan Sabuk Hijau (The Green Belt Movement) Terhadap Kebijakan Pemerintah Kenya Dalam Menjaga Keasrian Lingkungan Hidup Di Kenya. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1).
- Economy, A. P. (2017). The Link between Patenting of Life Forms, Genetic Engineering & Food Insecurity Author (s): Wangari Maathai Source: Review of African Political Economy, Vol. 25, No.77. Britain ^{â€™} African Policy: Ethical, or Ignorant? (Sep., 1998), pp.5, 25 (77), 526-528.
- Esquivel, V., & Sweetman, C. (2016). Gender and the Sustainable Development Goals. *Gender & Development*, 24(1), 1–8.
- Fischer, T. B., & Sykes, O. (2009). The Territorial Agenda of the European Union: Progress for Climate Change Mitigation. *The Town Planning Review*, 80(1), 57–82.
- Jemadu, A. (2003). Pembangunan dan Modernisasi: Implikasinya terhadap Tatanan Ekologi dan Sosial. *JAP*,

- 2003(2), 222–234.
- Kumar, S., Kumar, N., & Vivekadhish, S. (2016). Millennium Development Goals (MDGs) to Sustainable Development Goals (SDGs): Addressing Unfinished Agenda and Strengthening Sustainable Development and Partnership. *Indian Journal of Community Medicine, 41*(1), 1–4.
- Latipulhayat, A. (2014). Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 1*(3), 626–642.
- Maathai, W. (2004). Nobel Peace Prize Speech: Nobel Lecture, Oslo, 10 December 2004. *Meridians Vol. 6, No. 1, (2005)*, pp. 195-201.
- Maathai, W. (2015). An Unbreakable Link: Peace, Environment, and Democracy. *Harvard International Review 29.4 (2008):24+*.
- Magnuz Engardt, R. B. (2009). Climate and Emission Changes Contributing to Changes in Near-Surface Ozone in Europe over the Coming Decades: Results from Model Studies. *Ambio: Ozone Exposure and Impacts on Vegetation in the Nordic and Baltic Countries, 38*(8), 452–458.
- Matthew, R., & Hammill, A. (2009). Sustainable development and climate change. *Climate Change Research - Evaluation and Policy Implications, Proceedings of the International Climate Change Research Conference, 85*(6), 55–66.
- Medhora, P. B. (1972). Need We Stand Economic Theory on Its Head? *Economic and Political Weekly, 7*(18), 864.
- Media, A. F. (2017). Embracing Democratic Governance , Human Rights and the Environment Author (s): Wangari Maathai Source: Agenda: Empowering Women for Gender Equity, No.65. Women and Leadership Published by: Taylor & Francis, Ltd. On behalf of Agenda Feminist Med, (65), 12-16.
- Moussa, M., & Scapp, R. (1996). The Practical Theorizing of Michel Foucault: Politics and Counter-Discourse: Cultural Critique, No. 33 (Spring, 1996), pp. 87-112.
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Sosiologi Masyarakat, 18*(1), 75–100.
- Press, T. F., & York, N. (2017). The Planet Earth Is Our Common Home: Excerpts , Statement by The Commission on Global Governance, 11 September 1995. Author (s): Wangari Maathai Source: Women &™s Studies Quarterly, Vol. 24, No.1/2. Beijing and Beyond: Toward the Twenty-First, 24(1), 102-104.
- Schild, A., & Sharma, E. (2011). Sustainable Mountain Development Revisited. *Mountain Research and Development, 31*(3), 237–241.
- Sen, A. (2006). Development as Freedom: An India Perspective. *Indian Journal of Industrial Relations, 42*(2), 152– 169.
- Stern, N. H. (2007). The Economics of Climate Change: The Stern Review. *Great Britain: Cambridge University Press, 1*.
- United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development,

16301(October), 1–35.

Yustika, A. E. (2004). Reformasi Ekonomi, Konsensus Washington, Dan Rintangan Politik. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6(1), 1–14.

Artikel

Maathai, W. (2004). The Cracked Mirror. *Resurgence Magazine*.

Saad-Filho, A. (2010). Growth, Poverty and Inequality: from Washington Consensus to Inclusive Growth. *DESA Working Paper No.100*.

Sihombing, L. (2012). Green Economy dan Konferensi Tingkat Tinggi Rio + 20. *Info Singkat Hubungan Internasional*, IV(12).

Williamson, J. (2004). *Institute for International Economics. All rights reserved*.

Williamson, J. (2004). *A Short History of the Washington Consensus. From the Washington Consensus Towards a New Global Governance, Barcelona, September 24-25, 2004*.

Website

Bappenas. (2017). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Dipetik Oktober 11, 2017, dari SDGs Indonesia: <http://sdgsindonesia.or.id/index.php/sdgs/item/178-tujuan-pembangunan-berkelanjutan>.

Bekker, V. (2015, September 29). *U.N.'s New SDGs Are Driving the Global Development Agenda*. Dipetik September 29, 2017, dari Institutional Investor: <https://www.institutionalinvestor.com/article/b14z9xw6s0h9hn/uns-new-sdgs-are-driving-the-global-development-agenda>.

Childs, A. (2015, Juli 01). *How the Millennium Development Goals Failed the World's Poorest Children*. Dipetik September 27, 2017, dari The Conversation: <http://theconversation.com/how-the-millennium-development-goals-failed-the-worlds-poorest-children-44044>.

Devita, D. E., & Waluyo, T. J. (2014). Pengaruh Gerakan Sabuk Hijau (The Green Belt Movement) Terhadap Kebijakan Pemerintah Kenya dalam Menjaga Kearsian Lingkungan Hidup di Kenya. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1).

Firmanzah. (2015, Juni 15). *Lepas MDGs, Songsong SDGs*. Dipetik Oktober 25, 2017, dari Sindonews.com: <https://nasional.sindonews.com/read/1012602/149/lepas-mdgs-songsong-sdgs-1434329380>.

Galatsidas, A., & Sheehy, & F. (2016, Juli 06). *What Have the Millennium Development Goals Achieved?.* Dipetik September 26, 2017, dari The Guardian: <http://www.theguardian.com/global-development/datablog/2015/jul/06/what-millennium-development-goals-achieved-mdgs>.

Gibbs, D. (2015, November 19). *MDG Failures*. Dipetik September 27, 2017, dari The Borgen Project: <https://borgenproject.org/mdg-failures/>.

Kartakusuma, D. A. (2012, Juli 06). *Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20): "Masa Depan Yang Kita Inginkan"*. Dipetik Januari 01, 2017, dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia:

<http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan/>.

- Maathai, W. (1995, Agustus 30). *Bottlenecks to Development in Africa*. Dipetik Oktober 15, 2015, dari The Green Belt Movement: <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/key-speeches-and-articles/bottleknocks-to-development-in-africa>.
- Maathai, W. (2000, Mei 04). *Speak Truth to Power*. Dipetik Oktober 15, 2017, dari The Green Belt Movement: <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/key-speeches-and-articles/speak-truth-to-power>.
- Maathai, W. (2004, Desember 12). *The Challenge of AIDS in Africa*. Dipetik Oktober 15, 2017, dari The Green Belt Movement: <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/key-speeches-and-articles/challenge-of-AIDS>.
- Maathai, W. (2005a, Mei 10). *Inaugural World Food Law Distinguished Lecture*. Dipetik Oktober 5, 2017, dari The Green Belt Movement: <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/key-speeches-and-articles/inaugural-world-food-law-distinguished-lecture>.
- Maathai, W. (2005b, Juli 19). *Rise Up and Walk! The Third Annual Nelson Mandela Lecture*. Dipetik Oktober 5, 2017, dari The Green Belt Movement: <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/key-speeches-and-articles/rise-up-and-walk>.
- Maathai, W. (2006, Juni 16). *Sustained Development, Democracy, and Peace in Africa*. Dipetik Oktober 5, 2017, dari The Green Belt Movement: <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/key-speeches-and-articles/sustained-development-democracy-and-peace>.
- Maathai, W. (2009, Agustus 24). *Prof Wangari Maathai's keynote address during the 2nd World Congress of Agroforestry*. Dipetik September 15, 2017, dari The Green Belt Movement: <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/key-speeches-and-articles/2nd-world-congress-of-agroforestry-keynote-address>.
- Maathai, W. (2011, September 27). *An African Future: Beyond the Culture of Dependency*. Dipetik Oktober 15, 2017, dari Open Democracy: <http://www.opendemocracy.net/article/an-african-future-beyond-the-culture-of-dependency>.
- n.n. (2017). *Biography*. Dipetik Oktober 16, 2017, dari The Green Belt Movement: <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/biography>.
- n.n. (2015, Juli 03). *Where the Millennium Development Goals a success? Yes! Sort of*. Dipetik September 28, 2017, dari World Vision Internasional: <http://www.wvi.org/united-nations-and-global-engagement/article/were-mdgs-success>.
- n.n. (2017). *Kenya Forest Information and Data*. Dipetik Januari 01, 2017, dari Mongabaya.com: <https://rainforests.mongabay.com/>

- [deforestation/2000/Kenya.htm.](#)
- n.n. (2016, Januari 29). *Sierra Leoneans Show Pessimism in UN SDGs*. Dipetik September 30, 2017, dari AYV News: <http://ayvnews.com/AYVNews/index.php/news/item/668-sierra-leoneans-show-pessimism-in-un-sdgs>.
- OECD (2018), Net ODA (indicator). doi: 10.1787/33346549-en
- One India. (2017, Juni 06). *From 1901 to 2017: Know How India's Temperature Is Increasing over the Years*. Dipetik Januari 01, 2017, dari One India: <https://www.oneindia.com/india/from-1901-2017-know-how-india-temperature-is-increasing-0-2455548.html>.
- Pedersen, A. (2015). *From MDGs to SDGs: Botswana Can Lead Again*. Dipetik September 29, 2017, dari Daily News: <http://www.dailynews.gov.bw/news-details.php?nid=23343>.
- Sedayu, A. (2015, September 25). *Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Butuh Peran Publik*. Dipetik September 29, 2017, dari Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/703630/program-pembangunan-berkelanjutan-sdgs-butuh-peran-publik>.
- The Global Goals. (2017). *The Global Goals*. Dipetik Oktober 11, 2017, dari The Global Goals: <http://www.globalgoals.org/>.
- The World Bank. (2017). *Total Greenhouse Gas Emissions (Kt of CO2 Equivalent)*. Dipetik Maret, 23, 2017, dari The World Bank: data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.KT.CE?end=2012&start=1990&view=chart.
- The World Bank. (2017). *Forest Area (sq. km)*. Dipetik Maret, 23, 2017, dari The World Bank: data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2?view=chart.
- Unilever. (2017). *Apa itu perubahan iklim*. Dipetik Januari 01, 2017, dari Unilever: <https://brightfuture.unilever.co.id>.
- United Nations. (2000). *United Nations Millennium Declaration* (Vol. A/RES/55/2). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.003.0005>
- United Nations. (2017). *Antonio Guterres and The Sustainable Development Goals*. Dipetik September 29, 2017, dari United Nations: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/secretary-general/>.
- United Nations. (2017). *The Sustainable Development Agenda*. Dipetik November 27, 2017, dari United Nations: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>.
- United Nations. (n.d.). *Millennium Summit (6-8 September 2000)*. Dipetik November 27, 2017, dari United Nations: http://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml.
- Viva News. (2010, Desember 08). *Bappenas: 8 Bukti Indonesia Makin Sejahtera*. Dipetik Oktober 15, 2017, dari Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/192678-8-klaim-bappenas-orang-indonesia-makin-makmur>.

Lain- lain

Harry, H. (2014). Analisa Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (People Centered Development). *Andalsos: Staf Ahli Bidang Dampak Sosial Kemensos*, 1–17

Ministry of Environment Water And Natural Resources. (2013). *National Environment Policy*.